

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia kaya akan sumber daya di bidang agraris, sehingga sebagian penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian dan perkebunan memiliki andil untuk menambah pendapatan negara. Perlunya perhatian khusus untuk petani menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, dalam mengupayakan kesejahteraan petani. Namun demikian, realita di lapangan kesejahteraan petani masih jauh dari harapan. Tahun 2015 lalu terjadi peningkatan produksi pangan berdasarkan data badan pusat statistik dan data pendukung lainnya. Tetapi di sisi lain, laporan tersebut tidak ada korelasi dengan peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia, sehingga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, mengingat bangsa Indonesia saat ini memasuki era pasar bebas dan produksi petani akan berhadapan langsung dengan produk impor. Rentannya kesejahteraan petani dalam nilai tukar petani (NTP) yang makin menurun 0,22 persen dari 98,20 menjadi 97,98 persen. Padahal, rumah tangga petani (RTP) tanaman pangan terbesar yakni 70-75 persen dari 26,13 juta RTP. (<http://www.republika.co.id/berita/mpr-ri/berita-mpr/15/11/18/ny07kb359kunjungi-mpr-swiss-janjibantu-ribuan-petani-indonesia> diakses tanggal 25 Januari 2017).

Sejatinya, pemerintah telah mengupayakan berbagai program demi kesejahteraan petani Indonesia. Dengan alasan, bahwa sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan ekonomi, sehingga pertanian memiliki peran penting dalam

mengembangkan peran penting di bidang ekonomi pembangunan. Tujuan umum dari berbagai kebijakan yakni, petani Indonesia diharapkan memiliki kemandirian dan pengembangan sumber daya manusia, dengan begitu hasil produktivitas akan mengalami peningkatan. Adapun program pemerintah yang masih berjalan hingga saat ini salah satunya adalah tentang kebijakan pupuk bersubsidi. Salah satu contoh upaya yang dijalankan pemerintah sampai saat ini, yakni dalam penyaluran alokasi distribusi pupuk. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh keputusan menteri, yaitu melalui surat keputusan menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 pebruari 2003, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ([http:// www.kemenprin.go.id](http://www.kemenprin.go.id) . Diakses 18 Januari pukul 15.24 WIB).

Perlu diketahui bahwa, dari 34 provinsi di Indonesia, baru provinsi Jawa Tengah yang membuat inovasi dari kebijakan alokasi pupuk bersubsidi. Sebagai bentuk dukungan dan penyempurnaan atas kebijakan diatas, pemerintah provinsi Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan baru terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani Jawa Tengah. Gubernur mencetuskan kebijakan baru, atas asas memenuhi hak setiap warga untuk mendapatkan kesejahteraan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang harus diwujudkan sebagai cita-cita bangsa. Adapun demikian, kebijakan tersebut ada kemungkinan akan diterapkan secara nasional. Namun tetap provinsi Jawa Tengah yang memprakarsai atas kebijakan kartu tani.

Sesuai laman resmi [masganjar.co.id](http://masganjar.co.id) dijelaskan bahwa, upaya Ganjar Pranowo memberikan jaminan kesejahteraan kepada petani, melalui kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada petani dalam hal penyaluran pupuk yang dirancang dalam sebuah kartu tani. Kartu tani adalah alat transaksi penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di provinsi Jawa Tengah. Alasan dikeluarkan kebijakan tersebut yakni untuk meminimalisir pendistribusian pupuk bersubsidi yang dijual terbuka, sehingga banyak terjadi penyimpangan ([www.masganjar.co.id/program/kartu-tani](http://www.masganjar.co.id/program/kartu-tani). Diakses 17 Januari 2017). Gagasan Ganjar Pranowo terkait kebijakan barunya ini, diharapkan dapat memberikan solusi bagi petani dalam mendapatkan pupuk dengan mudah. Hal tersebut diungkapkan dalam harian [merdeka.com](http://merdeka.com), terkait ulasan berita diatas adalah, bahwa Gubernur Jateng menegaskan tentang sistem kartu tani untuk mengoptimalkan distribusi pupuk bersubsidi secara enam tepat, yakni jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat. Manfaat kartu tani tidak hanya untuk pendistribusian pupuk dan menjamin stok pupuk untuk petani, namun juga membantu untuk alokasi bantuan sarana produksi padi (saprodi) dan sarana produksi pertanian (saprotan) agar sesuai sasaran terhadap petani dalam kategori miskin ([www.merdeka.com/pertanian/kartu-tani](http://www.merdeka.com/pertanian/kartu-tani). Diakses pada tanggal 15 Pebruari 2017). Kartu tani merupakan kartu elektronik yang didesain khusus untuk petani, yang dapat berfungsi sebagai kartu debit BRI dan kartu yang dapat membaca kuota pupuk bersubsidi dan EDC BRI.

Gambar 1. 1. Desain Kartu Tani Tampak Depan



Sumber: Arsip Data Presentasi Sosialisasi BPP Giriwoyo 2016

Gambar 1. 2. Desain Kartu Tani Tampak Belakang



Sumber: Arsip Data Presentasi Sosialisasi BPP Giriwoyo 2016

Kebijakan ini dibuat, berangkat dari berbagai peristiwa atas tindak penyimpangan pupuk bersubsidi. Sehingga memberikan dampak negatif yang merugikan ke berbagai pihak, terutama bagi petani. Kasus penyelewengan pupuk di Jawa Tengah dirasakan masih memprihatinkan, salah satu kasus yang terjadi

yaitu di kabupaten Tegal. Menurut laporan di lapangan bahwa penyelewengan ini yang membuat stok pupuk berkurang dan petani tidak mendapatkan haknya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, berbagai praktik penyimpangan distribusi dan pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi permasalahan serius bagi semua pihak karena dapat mengganggu kedaulatan pangan di provinsi setempat. "Saya khawatir jangan-jangan pola-pola (penyimpangan pupuk bersubsidi) ini yang membuat stok kita berkurang dan kemudian rakyat tidak mendapat jatah," katanya di Tegal, Kamis (12/2). Hal tersebut disampaikan Ganjar saat mendatangi lokasi penggerebekan gudang pupuk oplosan oleh petugas gabungan Kodim 0712/Tegal dan Koramil 06/Kramat di Jalan Raya Dampyak KM 3, Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Terkait dengan adanya praktik penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi itu, Ganjar akan melakukan evaluasi dengan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah yang akan berlangsung dalam waktu dekat. (<http://www.beritasatu.com/ekonomi/248658-ganjar-penyimpangan-pupuk-bersubsidi-masalah-serius.html> diakses pada tanggal 24 Januari 2017).

Dengan begitu, diharapkan melalui program kartu tani ini, petani Jawa Tengah bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan pupuk. Proses pembuatan kartu tani ini, tentu memenuhi beberapa tahap sehingga menjadi sebuah kebijakan baru. Menurut William N Dunn (1999:21) metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yakni definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Begitu pula proses kebijakan publik dari Gubernur ini menghasilkan tentang kesepakatan bersama Gubernur Jateng dan Direktur PT. BRI Tbk. No. 004/2015, No. B. 122-DIR/ KPM/ 03/ 2105 bahwa kartu tani sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Jateng, yang telah ditandatangani pada tanggal 4 maret 2015 di Kabupaten Batang. ([www.masganjar.co.id](http://www.masganjar.co.id). Diakses 17 Januari 2017).

Kebijakan baru untuk sektor pertanian di Jawa Tengah ini, memang sesuai dengan kondisi sumber daya alam yang dimiliki di Jawa Tengah. Dalam data <http://birohumas.jatengprov.go.id> diakses pada tanggal 27 Januari 2017 yang menginformasikan terkait potensi yang dimiliki Jawa Tengah bahwa peran sektor pertanian dan perkebunan sampai saat ini masih mendominasi perekonomian penduduk, namun tidak semua wilayah di Jawa Tengah memiliki keadaan letak geografis, letak topografi dan memiliki curah hujan yang bagus, sehingga di berbagai kawasan Jawa Tengah memiliki karakteristik sendiri untuk kesesuaian jenis tanaman apa yang sesuai untuk dijadikan produksi hasil pertanian.

Dapat diambil contoh di kabupaten Wonogiri, berdasarkan informasi yang dilansir dari <http://dinpertantph.jatengprov.go.id/profil/?action=potensi> yang diakses pada tanggal 25 Januari 2007 mengungkapkan bahwa dari tiga provinsi yang memiliki curah hujan rendah salah satunya adalah kabupaten Wonogiri dan wilayah yang memiliki kriteria demikian merupakan penghasil tanaman palajiwana paling baik di Jawa Tengah. Tidak hanya itu, berdasarkan laporan yang dilansir oleh [bisnisukm.com](http://bisnisukm.com) tahun 2012 yang diakses pada tanggal 19 Januari 2017 menyatakan bahwa, hingga saat ini kabupaten Wonogiri adalah salah satu daerah yang memiliki potensi tinggi hasil pada bidang pertanian untuk di ekspor ke luar negeri, dengan hasil pertanian seperti mete dan tanaman hortikultura.

Data pendukung lainnya terkait wilayah kabupaten Wonogiri, yakni dari laman resmi Wonogiri, [www.wonogirikab.go.id/geografi](http://www.wonogirikab.go.id/geografi) yang diakses pada tanggal 18 Januari 2017 bahwa pemanfaatan lahan yang dimiliki yakni seluas 182.236.02 hektar, membuat kabupaten Wonogiri menjadi lahan pertanian dan

perkebunan yang menjanjikan. Kabupaten Wonogiri menjadi produsen mete terbesar di delapan kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki nilai jual tinggi dikancah ekonomi barang ekspor. Selain produsen mete, tanaman hortikultura juga menyusul menjadi hasil pertanian yang menjanjikan di kabupaten Wonogiri.

Sesuai peraturan yang ditetapkan terkait kebijakan baru di Jawa Tengah, maka kabupaten Wonogiri juga turut menggalakkan program kartu tani yang digawangi oleh dinas pertanian kabupaten Wonogiri.” Sosialisasi kartu tani ini dilakukan sebanyak satu kali di semua tingkatan. Yakni dari pihak pemerintah provinsi mensosialisasi ke tingkat kabupaten, yang dihadiri oleh pihak terkait, antara lain pemerintah daerah, dinas pertanian, dinas perdagangan, bank rakyat Indonesia cabang, produsen pupuk, distributor dan penyuluh pertanian” (Wawancara, koordinator BPP Giriwoyo pertanian 24 januari 2017). Membutuhkan proses yang panjang agar program ini dapat diterima dan direalisasikan oleh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh kepala koordinator diatas, dapat disimpulkan bahwa BPP juga turut mensosialisasikan kepada semua kelompok tani. Karena pada tingkatannya BPP berada pada paling bawah, yang berarti harus turun langsung kelapangan dan berinteraksi dengan petani.

Kemudian, untuk mendapatkan akurasi data yang didapatkan dari koordinator Balai Penyuluh Pertanian Giriwoyo, selanjutnya pencarian informasi dari pihak petani. Survei dilakukan di tiga kecamatan di kabupaten Wonogiri untuk mendapatkan klarifikasi dari petani daerah, terkait program kartu tani. Ketiga kecamatan tersebut antara lain Baturetno, Batuwarno dan Giriwoyo. Alasan pemilihan tiga kecamatan tersebut untuk dijadikan sampel, yakni

berdasarkan efisiensi waktu untuk menjangkau responden. Saat ditemui di lokasi yang berbeda dari petani Baturetno dan Batuwarno, mengungkapkan bahwa program kartu tani bagi mereka adalah program yang kreatif dan fungsional, beberapa dari mereka mengungkapkan tidak memperlumahkan birokrasi yang akan dihadapi. Selanjutnya, berbeda respon yang diberikan oleh petani Giriwoyo, beberapa dari mereka mengungkapkan bahwa program tersebut tidak begitu menarik karena berbagai alasan seperti kerumitan birokrasi yang akan dihadapi nanti, kemudian jarak yang mereka tempuh untuk menuju Bank untuk mengurus rekening dan penebusan. (Wawancara, September-Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani, ditemukan informasi bahwa petani pedesaan Giriwoyo bersikap kontra dengan program kartu tani. Sehingga sosialisasi dan realisasi program kartu tani di Giriwoyo tidak maksimal. Padahal program kartu tani ini wajib diikuti oleh semua petani di Jawa Tengah, termasuk petani desa Giriwoyo. Jika tidak memiliki kartu tani, maka petani tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Dan hal tersebut menghambat hasil panen petani.

Disamping itu, hasil wawancara lanjutan dengan koordinator Balai Penyuluh Pertanian Giriwoyo mengungkapkan bahwa tingkat ketidakpahaman dan ketidaktertarikan petani terhadap program ini dikarenakan tingkat pendidikan petani yang rendah. Perkiraan tingkat pendidikan petani antara lain yang tidak tamat sekolah kurang lebih 45 %, yang hanya tamat sekolah dasar kurang lebih 30 %, tamat SMP kurang lebih 15 % dan tamat SMA kurang lebih 5%. Tidak hanya itu, usia juga menjadi faktor penghambat sosialisasi dan realisasi program ini, perkiraan usia petani antara lain yang kurang dari usia 40 tahun kurang lebih 25

%, usia 41 tahun sampai 65 tahun kurang lebih 45 % dan yang lebih dari usia 75 tahun kurang lebih 30 %. Faktor penghambat yang ketiga yakni kendala jarak tempuh menuju Bank untuk membuat rekening dan mengisi deposit rekening mereka untuk penebusan maupun pembayaran pupuk. Misalnya, perkiraan jarak tempuh desa Pidekso menuju bank kurang lebih 20 km, desa Girikikis dan desa Gedong kurang lebih 15 km, desa Platarejo dan desa Tawangharjo kurang lebih 8 km (wawancara 25 Januari 2017). Masalah yang ditemukan di lapangan sesuai dengan pernyataan Bupati Wonogiri yang dilansir oleh [radarsolo.jawapos.com](http://radarsolo.jawapos.com).

**WONOGIRI** – Program kartu tani diragukan bisa berjalan efektif untuk meyejahterakan petani. Salah satu yang pesimistis program ini akan berhasil justru datang dari Bupati Wonogiri Joko Sutopo (Jekek).

Jekek dalam sosialisasi kartu tani kepada para distributor dan pengecer pupuk di pendapa kantor bupati kemarin menyebut bahwa petani seolah-olah menjadi kelinci percobaan dari pemerintah. Kebijakan belum terlaksana sudah muncul kebijakan baru. Terlebih tentang program kartu tani yang dinilai masyarakat belum siap dengan teknologi pembayaran elektronik.

“Kalau saya, kita ini kan tidak hidup di Jepang, masih banyak masyarakat kita yang tidak paham. Masih banyak yang tidak bisa baca tulis, letak geografis kita apakah bisa menjangkau? Belum lagi SDM (sumber daya manusia),” kata Jekek, Selasa kemarin (26/7).

Menurut Jekek, Pemprov Jateng dalam membuat program kartu tani harus berkaca dari program e-KTP. Di mana program ini banyak menghamburkan uang, namun sampai sekarang masih ada kendala di lapangan.

“Lihat saja e-KTP? Apakah program itu berjalan?Sekarang blangko habis.Kalaupun ada, lalu gantian rebon habis,” katanya.

Jekek menyadari bahwa di balik meja memang kartu tani merupakan program untuk mengendalikan distribusi pupuk. Namun, Jekek meyakini bahwa tanpa kartu tani pun asal pemerintah daerah tegas, maka distribusi pupuk akan bisa terkontrol. (<http://radarsolo.jawapos.com/read/2016/07/27/2910/bupati-jekek-ragukan-kartu-tani>. diakses pada tanggal 28 Februari 2017)

Melihat peristiwa tersebut, maka diperlukan suatu strategi komunikasi dalam mensosialisasikan program bagi Balai Penyuluh Pertanian untuk

memaksimalkan program untuk dapat direalisasikan. Balai Penyuluh Pertanian telah menyampaikan informasi terkait kemudahan-kemudahan yang akan didapatkan oleh petani, jika petani memiliki kartu tani. Dalam sosialisasinya, Balai Penyuluh Pertanian telah dilakukan sebanyak 146 kali dari jumlah kelompok tani yaitu 146 kelompok. Sosialisasi dilakukan sekali disetiap kelompok tani secara formal, namun untuk sosialisasi secara informal dilakukan sebanyak lebih dari tiga kali, ungkap Sitam selaku koordinator Balai Penyuluh Pertanian Giriwoyo (Wawancara, 23 Januari 2017).

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian Giriwoyo berlangsung dari bulan Maret hingga bulan Oktober 2016. Dan, selama sosialisasi tersebut sudah dilakukan pendataan petani dengan rincian lampiran antara lain :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Fotokopi Pipil Pajak untuk mengetahui letak tanah, luas tanah yang dikelola serta kebutuhan pupuk yang diminta.

Terkait kebutuhan pupuk yang diinginkan, maka tertera jelas jenis pupuk apa, jumlah yang diinginkan dan waktu yang dibutuhkan. Upaya Balai Penyuluh Pertanian tidak hanya sampai sosialisasi, namun juga pendampingan terhadap petani, validitas data petani, pelatihan hingga penerbitan kartu tani.

Disamping itu, faktor lain yang membuat program ini begitu lama diterima oleh petani, yakni enggannya petani untuk bertanya kepada penyuluh. Maka dari itu, diperlukan upaya dari penyuluh untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan petani, untuk membangun hubungan komunikasi yang interaktif. Selain itu, Balai Penyuluh Pertanian membutuhkan strategi komunikasi yang efektif

untuk memaksimalkan program dari tahap sosialisasi hingga dapat direalisasikan dengan maksimal. Menciptakan hubungan ketergantungan antara lembaga dan masyarakat sangat diperlukan, dimana penyuluh adalah penyalur informasi dan masyarakat adalah penerima hak atas informasi.

Berangkat pada fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: “ **Proses Komunikasi Penyuluhan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Untuk Mensosialisasikan Program Kartu Tani Di Kecamatan Giriwoyo Tahun 2017** “.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana proses komunikasi penyuluhan Balai Penyuluh Pertanian kecamatan Giriwoyo untuk mensosialisasikan program kartu tani di kecamatan Giriwoyo tahun 2017?”.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan dalam rumusan masalah yang dituliskan diatas, maka penulis memiliki tujuan, sebagai berikut :

Untuk mendeskripsikan proses komunikasi yang digunakan oleh Balai Penyuluh Pertanian dalam mensosialisasikan program kartu tani di kecamatan Giriwoyo tahun 2017

Untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang dihadapi oleh Balai Penyuluh Pertanian Giriwoyo dalam mensosialisasikan program kartu tani di kecamatan Giriwoyo tahun 2017.

Untuk mendiskripsikan tanggapan petani tentang penyuluhan oleh Balai Penyuluh Pertanian Giriwoyo dalam program kartu tani 2017

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan atau wawasan dalam kajian strategi komunikasi.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Balai Penyuluh Pertanian ( BPP ) Kecamatan Giriwoyo**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi lembaga sebagai masukan dalam peningkatan strategi komunikasi khususnya dalam mensosialisaikan program kartu tani untuk petani kecamatan Giriwoyo.

###### **b. Bagi Petani Kecamatan Giriwoyo**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi petani Giriwoyo khususnya di bidang program kartu tani.

## **E. KAJIAN TEORI**

### **1) Komunikasi Penyuluhan**

Istilah penyuluhan sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Penyuluhan berasal dari kata *extension* yang bermakna dalam bahasa Indonesia adalah perluasan atau penyebarluasan ( Amri, Jahi. 1984 ). Jika dilihat dari etimologi, istilah penyuluhan berasal dari kata dasar *suluh* yang bermakna pemberi terang ditengah kegelapan. Sehingga makna sederhana dari penyuluhan yakni proses untuk memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang sesuatu yang belum mereka ketahui, untuk diterapkan dan dilaksanakan dengan maksud meningkatkan produksi dan pendapatan atau keuntungan yang ingin dicapai melalui proses pembangunan ( Mardikanto dan Sutarni, 1982 ).

Dalam fokus komunikasi penyuluhan, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah garis besar dari makna penyuluhan. Hal ini merujuk pada pentingnya kualitas sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam aspek pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya, karena kualitas manusia adalah kunci dalam aspek pembangunan. Maka dari itu usaha peningkatan kualitas manusia tersebut menjadikan peranan komunikasi sangat dibutuhkan. (Levis, Leta. 1996 :4).

Menurut Mardikanto (2005) mengatakan bahwa jika penyuluhan sebagai proses , maka kegiatan penyuluhan mencakup kegiatan edukasi, diseminasi atau penyebarluasan informasi, memberikan fasilitas, sebagai penasehat atau menerima konsultasi, supervise, monitoring dan evaluasi.

Penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai suatu sistem pendidikan di luar sekolah untuk keluarga-keluarga tani di pedesaan, di mana mereka belajar sambil berbuat untuk menjadi mau, tahu dan bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapinya secara baik, menguntungkan dan memuaskan (Wiriaatmaja, 1986).

Menurut rumusan UU No. 15/2006, Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

H.S Hawkins merumuskan pengertian penyuluhan secara sederhana, bahwa penyuluhan adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan kegiatan komunikasi, guna memberikan informasi dalam keadaan sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat, dengan demikian dapat membuat keputusan yang tepat ( 1999 : 23-25 ).

Samsudin ( dalam Nasution, 1996 : 11 ) menambahkan bahwa penyuluhan adalah upaya yang dilakukan melalui pendidikan non formal yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang agar turut mengikuti dan mau melaksanakan ide-ide baru. Pernyataan tersebut apat disimpulkan dalam tiga hal kunci utama, yakni : pendidikan, mempengaruhi agar turut serta atau mengajak orang secara sadar dan ide-ide baru. Tiga kunci utama tersebut senantiasa melekat dalam kegiatan

penyuluhan yang pada hakekatnya merupakan suatu langkah dalam usaha mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluhan dengan demikian dapat diartikan sebagai suatu sistem pendidikan yang bersifat non formal di luar sistem sekolah yang biasa (Setiana, 2005 : 2 )

Menurut Hafsa (2009 : 38) menambahkan tentang penyuluhan yaitu kegiatan pemberdayaan petani dan keluarganya melalui kegiatan pendidikan non formal di bidang pertanian, sehingga melalui kegiatan ini dapat membantu di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat petani.

Tujuan dari komunikasi penyuluhan adalah untuk merubah perilaku, tidak hanya sekedar memberitahu dan menerangkan, akan tetapi merujuk pada perubahan perilaku, yang berarti menyangkut tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan dari sasaran komunikasi ( Rejeki dan Herawati, 1999 : 10 ).

Tujuan komunikasi penyuluhan pada dasarnya sama dengan umumnya, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurut Levis (1996 : 98), adapun tujuan komunikasi penyuluhan di dalam masyarakat pedesaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Informatif, yaitu tujuannya memberikan informasi yang menggunakan pendekatan pikiran

- b. Persuasif, bertujuan untuk mengubah perasaan penerima pesan atau informasi
- c. Mengubah perilaku ( sikap, pengetahuan, keterampilan )
- d. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pembangunan

Tujuan tersebut pada intinya arar masyakat memahami, dan dapat menentukan sikap dalam menerima dan menerapkannya.

Menurut Mardikanto ( dalam Rejeki dan Herawati, 1993 : 11-17 ) bahwa penyuluhan pertanian dapat dipahami dalam empat proses, yaitu :

- a. Penyuluhan sebagai proses informasi.

Melalui penyuluhan akan terjadi penyebarluasan informasi. Informasi yang dimaksud terkait dengan materi, sumber informasi, maupun alur informasi.

- b. Penyuluhan sebagai proses penerangan

Penyuluhan adalah kegiatan untuk memberikan penjelasan dan penerangan kepada mereka yang belum mengetahui, untuk melaksanakan atau menerapkan yang ingin dicapai melalui proses pembangunan.

- c. Penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku

Tujuan dari penyuluhan adalah mampu mengubah perilaku tidak sekedar member pengarahan dan penjelasan. Perubahan perilaku yang dimaksud menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari sasaran komunikasi.

- d. Penyuluhan sebagai proses pendidikan

Penyuluhan yang dilakukan dalam arti untuk memberikan pemahaman, pengetahuan tentang segala sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat, kegiatan tersebut dilakukan dengan adanya paksaan, dan tidak lupa menyediakan sumber daya yang diperlukan.

## **2) Perencanaan Program Penyuluhan**

Perencanaan program menurut Martinez (dalam Mardikanto, 1993) mengungkapkan bahwa perencanaan program merupakan upaya perumusan, pengembangan, dan pelaksanaan program-program. Perencanaan program merupakan suatu proses yang berkelanjutan, melalui semua warga masyarakat, penyuluh dan para ilmuwan memusatkan pengetahuan dan keputusan-keputusan dalam upaya mencapai pembangunan yang mantap. Di dalam perencanaan program, sedikitnya terdapat tiga pertimbangan yang menyangkut: hal-hal, waktu, dan cara kegiatan-kegiatan yang direncanakan itu dilaksanakan.

Lawrence juga menambahkan (dalam Mardikanto, 1993) dalam suatu perencanaan program penyuluhan akan terkait perumusan tentang:

- a. Proses perencanaan program
- b. Penulisan perencanaan program
- c. Perencanaan kegiatan program
- d. Perencanaan pelaksanaan
- e. Perencanaan evaluasi hasil pelaksanaan.

Rumusan dari proses diatas merupakan proses yang berkesinambungan terkait penentuan dan pengambilan keputusan yang menyangkut situasi, pentingnya

masalah, atau kebutuhan, perumusan tujuan dan upaya pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Tentang proses perumusan program, tidak berhenti sampai teori diatas, ahli lain menetapkan ada delapan tahap proses yang dikemukakan oleh Pesson, yaitu :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data-data dasar atau fakta yang diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan atau kegiatan yang akan dilakukan. Data-data tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, teknologi yang telah digunakan, dan peraturan yang ada.

b. Analisis keadaan

Tahap dalam menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, termasuk didalamnya menganalisis sumber daya yang potensial untuk dikembangkan, menganalisa perilaku masyarakat yang dijadikan sasaran, keadaan yang ingin dicapai dan yang sudah dicapai, dan sebagainya.

c. Identifikasi masalah

Tahap dalam merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki.

d. Perumusan tujuan

Tahap dalam merumuskan tujuan, dalam tahap ini hal yang perlu diperhatikan adalah realistiknya tujuan yang hendak dicapai, dengan meninjau dari kemampuan sumber daya (biaya, jumlah, dan kualitas tenaga) dan waktu yang tersedia.

e. Penyusunan rencana kegiatan

Tahap ini untuk menyusun rencana kerja yang meliputi penjadwalan, metode yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat, lokasi kegiatan, bahan dan peralatan yang dibutuhkan, pembiayaan dan sebagainya.

f. Pelaksanaan rencana kegiatan

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari rencana yang telah disusun.

g. Menentukan progresifitas kegiatan

Tahap ini merupakan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, untuk melihat sejauh mana tujuan telah dicapai.

h. Rekonsiderasi

Tahap ada peninjauan kembali rumusan program, termasuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahap ini dilihat hal-hal yang menjadi kendala atau sebaliknya keberhasilan yang dicapai, dalam rangka menyusun program berikutnya.

Untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan program yang telah dirumuskan itu telah “baik”, Mardikanto 1992 menyatakan tentang beberapa acuan pengukuran yang mencakup:

- a. Analisis fakta dan keadaan
- b. Pemilihan masalah berlandaskan kebutuhan
- c. Jelas dan menjamin keluwesan
- d. Merumuskan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan kepuasan
- e. Proses yang berkelanjutan
- f. Merupakan proses belajar mengajar
- g. Merupakan proses koordinasi
- h. Memberikan kesempatan evaluasi proses dan hasilnya

### **3) Media Penyuluhan**

Media penyuluhan adalah alat penyampai atau penghantar suatu materi pesansehingga dapat sampai kepada penerima (sasaran penyuluh). menurut A. G. Kartasaputra 1998, media penyuluhan adalah saluran yang dapat menghubungkan penyuluh dengan materi penyuluhannya dengan petani yang memerlukan penyuluhannya.

Setiap media dan alat bantu memiliki daya serap yang berbeda, oleh karena itu menggunakan lebih dari satu media dan alat bantu sangat dianjurkan (Waryana,2016:41). Sebagai perantara yang dipercaya dapat menghubungkan antara penyuluh dengan petani, media penyuluhan hendaknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut;

- a. Dinamis dan dapat menyatukan berbagai pihak, beritikad baik, umum dan dapat menampung segala pesan, kegiatan beserta eluhannya dalam masyarakat
- b. Sederhana tetapi mapan dan tepat dalam penampilannya sehingga penyuluh atau sasaran (para petani) tidak segan dan enggan untuk memanfaatkannya
- c. Yang mudah diikuti dan diperoleh kedua belah pihak (penyuluh ataupun sasaran), tidak membutuhkan banyak persyaratan dan pengorbanan
- d. Isinya dapat memberikan hal-hal yang praktis yang dapat diselenggarakan oleh masyarakat, misalnya dapat mewujudkan perbaikan nyata dalam jangka pendek yang sejalan dengan program
- e. Murah dalam pembiayaan baik dari sudut pandang penyuluh maupun sasaran (para petani)
- f. Dapat menimbulkan pengaruh positif

Dapat disimpulkan bahwa, media memiliki fungsi untuk mendidik, mengawasi, menghibur serta memberi pengaruh yang positif dalam kegiatan penyuluhan, sehingga dapat dikatakan bahwa media merupakan komponen yang paling dominan dalam melakukan proses penyuluhan.

#### **4) Unsur-unsur Penyuluhan**

Unsur-unsur penyuluhan pertanian merupakan semua faktor-faktor yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Semua faktor tersebut saling menunjang atau saling terkait agar tercapai tujuan yang dikehendaki. Menurut Kartasapoetra 1987 menyebutkan unsur-unsur pertanian sebagai berikut :

- a. Penyuluhan ( sumber )
- b. Sasaran penyuluhan
- c. Metode penyuluhan
- d. Media penyuluhan
- e. Materi penyuluhan
- f. Waktu penyuluhan
- g. Tempat penyuluhan

#### **5) Evaluasi Penyuluhan**

Evaluasi penyuluhan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menentukan apakah program telah mencapai sasarannya, dan apakah sasaran tersebut dapat dicapai lebih efektif dengan menggunakan cara lain. Hal ini memungkinkan semua yang terlibat dalam program penyuluhan dapat berjalan lebih efektif dari pengalaman dengan melakukan pengamatan yang sistematis serta analisis terhadap pengalamannya ( Ban dan Hawkins, 1999 ).

Kartasapoetra 1994 menambahkan terkait evaluasi program penyuluhan adalah tentang mengetahui apakah jenis kegiatan penyuluhan telah

memberi perubahan baru yang positif pada pengelolaan usaha tani atau tidak, dan perubahan yang positif pada pengelolaan usaha tani meliputi perubahan yang mengarah ke arah perbaikan cara bercocok tanam, cara pemungutan hasil, termasuk perubahan sarana pertanian yang telah atau sedang dipakai oleh petani. Soumelis (dalam Mardikanto, 1993:322) mengartikan bahwa evaluasi sebagai proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap sesuatu obyek. Evaluasi merupakan kegiatan terencana dan sistematis yang meliputi:

- a. Pengamatan untuk pengumpulan data atau fakta
- b. Penggunaan pedoman yang telah ditetapkan
- c. Pengukuran atau membandingkan hasil pengamatan dengan pedoman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu
- d. Pengambil keputusan atau penilaian

Disamping itu, dapat disimpulkan bahwa evaluasi harus bersifat obyektif, yaitu evaluasi harus berdasarkan fakta bukan berdasarkan praduga seseorang ataupun intuisi seseorang. Selain itu evaluasi juga harus menggunakan pedoman-pedoman tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Mardikanto, 1993:321-322).

## **6) Hambatan-hambatan Program Penyuluhan**

Sistem penyuluhan akan sangat tidak efektif bila terdapat kekurangan-kekurangan teknis seperti kurangnya informasi, dan teknologi yang memadai yang bisa disampaikan ke petani. Selain itu adanya kekurangan staf dan model

penyuluhan menyangkut penyebaran informasi dan teknik penyampaian adalah contoh dari faktor penghambat kelancaran penyuluhan (Bayer et al, 1999).

Hambatan proses komunikasi dalam penyuluhan dapat disebabkan oleh:

- a. Kurangnya minat petani saat melakukan penyuluhan
- b. Adanya sikap acuh karena biasanya usaha pertanian bukan usaha pokok
- c. Penggunaan metode yang kurang tepat saat melakukan penyuluhan
- d. Sarana yang tidak memadai saat melakukan penyuluhan

Dalam proses pertukaran pesan kemungkinan terjadi kesalahpahaman antar pelaku komunikasi sangat besar, aapun demikian hambatan-hambatan komunikasi penyuluhan akan muncul, seperti yang diungkapkan oleh Purwanto dan Djoko dibawah ini . Faktor-faktor penghambat komunikasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat masalah utama , dikemukakan oleh Purwanto, Djoko (2009: 13), mencakup :

1. masalah dalam mengembangkan pesan
2. masalah dalam penyampaian pesan
3. masalah dalam menerima pesan.
4. masalah dalam menafsirkan pesan.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1) Jenis Penelitian**

Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti atau menyelidiki status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang ( Nazir, 2003 :54 ).

Metode deskriptif ini digunakan untuk membuat gambaran, membuat deskripsi ataupun lukisan fenomena yang sistematis, namun tetap harus faktual dan akurat. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan, memaparkan atau menggambarkan suatu gejala, kejadian, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang. Disamping itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung ( Noor, 2011 : 35 ). Maka dari itu, melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini peneliti ingin meneliti tentang bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Giriwoyo dalam mensosialisasikan program kartu tani tahun 2017.

### **2) Teknik Pengumpulan Data**

Saat melakukan pengumpulan data peneliti harus hati-hati, mengingat permasalahan yang diambil memiliki tingkat sensitifitas dan kerahasiaan, maka dari itu, peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengambilan data dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan, atau juga bisa diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab di kesempatan lain ( Noor, 2011 : 138 ).

b. Dokumentasi

Pendukung data yang lain adalah dokumen yang berisi fakta-fakta terkait permasalahan yang terjadi, sebagian besar data berupa artikel, catatan harian, data yang tersimpan didalam web site, data di server atau flashdisk, laporan dan foto ( Noor, 2011 : 141 ).

c. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan pengamatan suatu objek yang berproses dengan kompleks, karena tersusun atas proses biologis dan proses psikologis, sehingga dalam teknik mengandalkan proses pengamatan dan ingatan Esterberg, dalam Sugiyono, 2013 : 231 ). Moelong 1988 ( dalam Patton : 131 -132 ) membagi empat peranan peneliti dalam observasi, yaitu :

1) Berperanserta Secara Lengkap ( aktif )

Peran pengamat yaitu menjadi anggota penuh dari kelompok yang diamatinya.

2) Pemeranserta Sebagai Pengamat

Pengamat tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta, tetapi masih melakukan fungsi pengamatan.

3) Pengamat Sebagai Pemeranserta

Peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh umum bahkan mungkin ia atau mereka disponsori oleh para subjek.

4) Pengamat Penuh ( pasif )

Peneliti dengan bebas melakukan pengamatan, sedangkan subjek yang diamati sama sekali tidak mengetahui apakah mereka sedang diamati atau tidak.

Berdasarkan beberapa peran peneliti diatas, maka peran yang telah peneliti lakukan adalah sebagai pengamat penuh ( pasif ). Peneliti melakukan pengamatan saat sosialisasi program kartu tani 2017 dilaksanakan saat bulan oktober 2016 lalu di kantor Balai Penyuluh Pertanian.

### **3) Teknik Pengambilan Informan**

Teknik pengambilan informan yang dipilih oleh peneliti adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik yang menggunakan pertimbangan khusus terhadap informan yang benar-benar mengetahui dan memahami persoalan tersebut ( Noor : 2011 : 155 – 156 ). Pada teknik ini peneliti menitikberatkan terhadap informan yang dianggap memiliki informasi akurat

terkait permasalahan yang terjadi dan dapat memiliki kredibilitas, sehingga menjadi sumber data yang baik. Demikian peneliti menentukan beberapa kriteria atas masing-masing informan, yaitu :

- a. Kriteria Informan Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluh Pertanian Giriwoyo adalah penyuluh aktif yang terlibat dalam sosialisasi program kartu tani 2017
- b. Kriteria Informan Peserta Sosialisasi Program Kartu Tani
  - 1) Anggota kelompok tani
  - 2) Aktif mengikuti penyuluhan

#### **4) Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data interaktif, dimana konsep data interaktif terdiri dari tiga tahapan dalam menganalisis data. Sebagaimana yang diungkapkan Miles dan Huberman ( 2014 : 10 -12 ), yaitu :

- a. *Data Reduction* ( reduksi data )

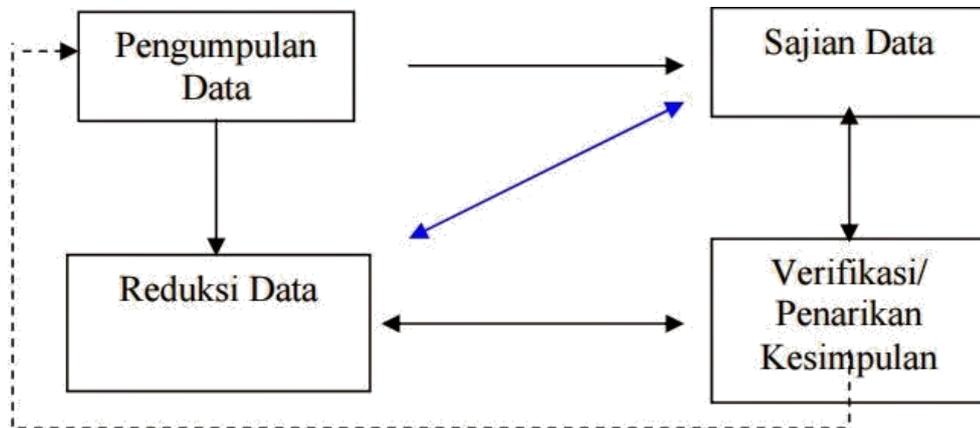
Peneliti memilah milah hasil wawancara untuk memastikan kesesuaian data, serta membuang data yang tidak dianggap tidak perlu atau tidak pantas untuk ditunjukkan.

- b. *Data Display* ( penyajian data )

Tahap selanjutnya setelah reduksi data dilakukan, yakni mengelola informasi dengan cermat agar peneliti dapat memahami atau mencerna hasil reduksi data

c. *Drawing and verifying conclusion* ( penarikan serta pengujian kesimpulan ) merupakan tahap akhir dalam mengelola data yang dianalisis secara kualitatif, sehingga hasil akhir dari analisis ini dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian.

Gambar 1.3. Komponen Analisis Data : Model Interaktif



Sumber : Miles and Hiberman ( 2004 : 10-12 )

### 5) Uji Validitas Data

Dengan menggunakan beberapa teknik yang diatas, penulis menggunakan cara wawancara, dokumen dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut setiap hasilnya akan dibandingkan untuk menentukan kredibilitas dan keakuratan data. Kemudian, dalam penelitian ini menggunakan sumber sebagai teknik triangulasi, sebagaimana yang dinyatakan Patton dalam Lexy J . Moelong ( 2000 : 178 ) triangulasi dengan sumber yakni membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif, hal tersebut dapat dicapai dengan cara :

- a. Membandingkan data dari hasil wawancara mendalam dengan data hasil observasi.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan saat berada di kawasan umum dengan apa yang ia utarakan secara pribadi.

- c. Membandingkan apa saja yang diutarakan orang-orang terkait situasi penelitian dengan apa yang pernah ia katakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan situasi dan pandangan seorang dari berbagai pendapat dan pandangan seorang rakyat biasa, orang yang memiliki pendidikan menengah dan tinggi, dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil isi wawancara dan isi dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah poin a yaitu membandingkan data dari hasil wawancara dengan hasil observasi, poin d, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan yang memiliki latar belakang berbeda tingkatan untuk mengetahui perbandingan data yang diperoleh, dan poin e, peneliti juga mendapatkan arsip dokumen berupa materi presentasi, arsip petani berbagai judul, dengan begitu peneliti mengkaitkan data dengan membandingkan hasil wawancara juga.